

PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi Kasus Di Kecamatan Tambaksari Surabaya)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
Gelar Sarjana pada FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

MUHAMAD ERVAN SANTOSO
NPM. 0541010095

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
SURABAYA**

2011

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA).**

Penulisan proposal skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Hartono Hidayat, Msi. selaku dosen pembimbing dengan penuh kesabaran yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dan bantuan kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan. Disamping itu penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Bapak DR. Lukman Arif, MSi, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Diana Hertati, Msi, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5. Bapak Ir. Hidayat Syah, MT selaku Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya yang telah membantu penelitian saya "MAJU TAK GENTAR".
6. Ibu Yustisia selaku bidang sarana dan prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya
7. Keluargaku tercinta, terima kasih atas doa restu, perhatian dan kasih sayang serta finansialnya.
8. Semua teman-teman angkatan '45 yang telah membantu pemikiran dan waktu luang.
9. ALL CREW C123 penyemangatku dan menemaniku dalam pengerjaan laporan skripsi.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon adanya kritik dan saran demi kesempurnaan proposal skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan bagi yang memerlukan.

Surabaya, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori.....	11
2.2.1. Pengertian Peran.....	11
2.2.2. Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih	12
2.2.3. Pengawasan	14
2.2.3.1. Pengertian Pengawasan	14
2.2.3.2. Macam-macam Pengawasan	16
2.2.4. Koordinasi	17
2.2.4.1. Arti dan Pentingnya Koordinasi	17
2.2.4.2. Tipe-tipe Koordinasi	19
2.2.4.3. Sifat-sifat Koordinasi.....	20
2.2.4.4. Tujuan Koordinasi.....	20
2.2.4.5. Syarat-syarat Koordinasi	21
2.2.4.6. Cara-cara Melakukan Koordinasi.....	22
2.2.5.Kebersihan	23
2.2.5.1. Pengertian Kebersihan	23
2.2.6. Permasalahan Sampah	24

2.2.7. Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah	29
2.2.7.1. Sistem Pengelolaan Sampah	29
2.2.7.2. Sistem Pembuangan Akhir Sampah	33
2.2.8. Sarana dan Prasarana Kebersihan	36
2.3. Kerangka Berpikir	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	39
3.2. Fokus Penelitian	40
3.3. Sumber Data	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data	43
3.5. Analisis Data	44
3.6. Keabsahan Data	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan	50
4.1.1. Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	53
4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	54
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	56
4.1.4. Komposisi Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	65
4.2. Hasil Penelitian	69
4.2.1. Koordinasi	69
4.2.1.1. Tujuan Koordinasi	76
4.2.1.2. Cara-cara Melakukan Koordinasi	77
4.2.2. Pengawasan	79
4.2.2.1. Cara-cara Pengawasan	81
4.2.2.2. Bentuk Pengawasan	82
4.3. Pembahasan	84
4.3.1. Koordinasi	84
4.3.1.1. Tujuan Koordinasi	86

4.3.1.2. Cara-cara Mengadakan Koordinasi.....	88
4.3.2. Pengawasan.....	90
4.3.2.1. Cara-cara Pengawasan	91
4.3.2.2. Bentuk Pengawasan	93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran-saran.....	97

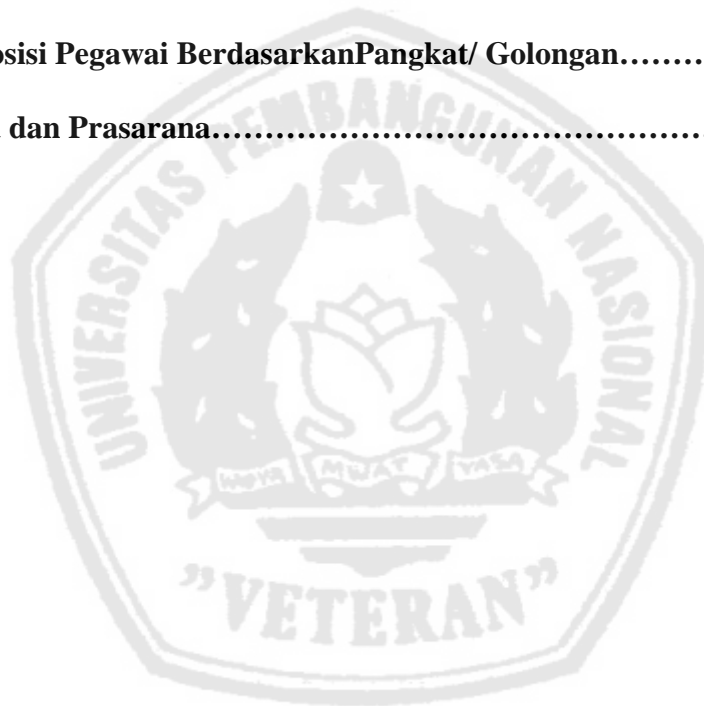
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



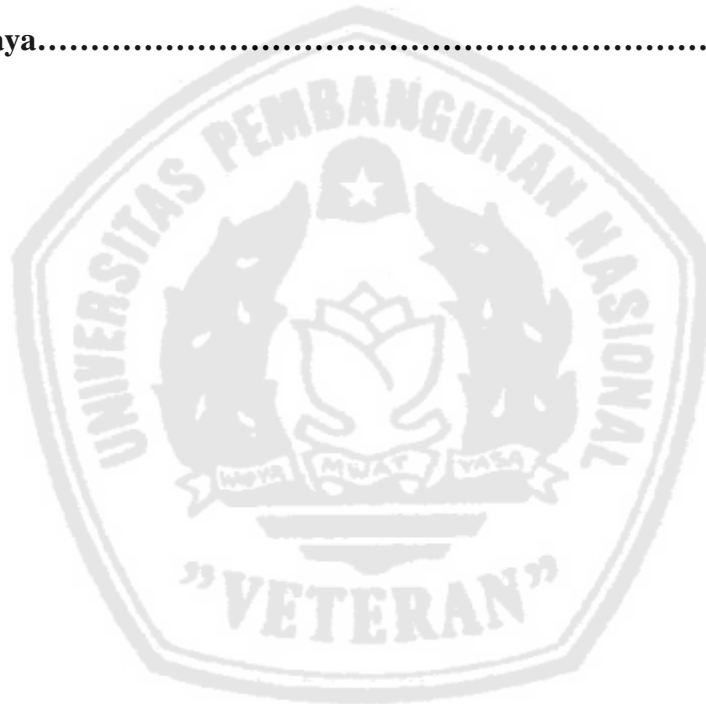
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Volume Sampah Yang Dihasilkan Berdasarkan Kecamatan di Kota Surabaya.....	6
Tabel 4.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja.....	65
Tabel 4.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
Tabel 4.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	66
Tabel 4.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan.....	67
Tabel 4.5. Sarana dan Prasarana.....	68



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Berpikir.....	38
Gambar 2 Analisis Model Interaktif Miles dan Hubberman.....	46
Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.....	55



ABSTRAKSI

MUHAMAD ERVAN SANTOSO, 0541010095, PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA, SKRIPSI 2011.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode analisis data penelitian adalah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini digambarkan suatu fenomena dengan jalan mendeskripsikannya. Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variable yaitu peran Dinas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud peran adalah bagian yang harus dilaksanakan atau perangkat tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan memperhatikan fenomena yaitu semakin bertambahnya penduduk Surabaya otomatis menimbulkan banyak juga sampah yang dihasilkan dari aktifitas-aktifitas penduduk Surabaya. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Pengolahan sampah di kota Surabaya saat ini belum dikelola secara maksimal, pengelolaan yang ada saat ini hanya terbatas pada pengolahan sampah secara konvensional yaitu hanya diangkut dari tempat penghasil sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kemudian hanya dibuang begitu saja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Jumlah sampah yang dihasilkan kota Surabaya saat ini adalah sekitar 9.675 m³/hari dan yang masuk ke TPA adalah sekitar 6.064 m³/hari, itu berarti pengolahan sampah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA belum dilakukan secara optimal. Di Kecamatan Tambaksari, ditemukan fakta tentang minimnya alat pengolah sampah seperti takakura atau komposter. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah dengan meningkatkan koordinasi dan pengawasan tentang pemanfaatan dan pengangkutan sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Kebersihan Pemerintah Kota Surabaya di Kecamatan Tambaksari adalah untuk mendeskripsikan bagaimana koordinasi yang dilakukan dan mengetahui model pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan kebersihan di Kecamatan Tambaksari Surabaya.

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya yang utamanya menangani kebersihan serta kader lingkungan Kecamatan Tambaksari Surabaya.

Fokus pertama, adalah koordinasi, cara-cara mengadakan koordinasi yang dilakukan dan tujuan dalam koordinasi tersebut. Fokus kedua, adalah cara-cara pengawasan yang dilakukan dan bentuk pengawasan.

Hasil dari penelitian ini mengenai koordinasi dan pengawasan sudah berjalan dengan baik dilihat dari adanya kegiatan pemanfaatan sampah oleh masyarakat dan pengangkutan sampah yang rutin dilakukan setiap hari oleh Dinas.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sudah menjalankan perannya tapi masih memerlukan pengawasan yang lebih.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan situasi dan kondisi pemerintahan Indonesia dewasa ini, tidak terlepas dari pengaruh dan maraknya tuntutan profesi. Salah satu dampaknya adalah terjadi perubahan mendasar terhadap tatanan pemerintahan, yaitu dengan adanya perubahan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan wewenang untuk daerah dalam peningkatan pembangunan.

Berdasarkan prinsip Undang-Undang diatas, melaksanakan Pemerintahan Daerah secara luas, nyata dan tanggung jawab dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota, bukan kepada Daerah Propinsi. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintah akan berjalan efektif dan efisien jika antara yang memberikan pelayanan dan perlindungan dengan yang diberi pelayanan dan perlindungan berada dalam jarak hubungan yang relatif dekat. Harapan yang ingin didapatkan pemerintah daerah adalah agar dapat melaksanakan fungsi pemerintahan umum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat.

Penyelenggaraan pemerintah di daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 20 ayat 3 tentang Asas Penyelenggaraan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya menurut Pasal 151 ayat 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan daerah

menyebutkan bahwa rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tuntutan akan pembangunan yang membawa ke situasi yang lebih baik, merupakan konsekuensi logis dari dinamika kehidupan masyarakat yang selalu ditandai dengan adanya perubahan. Perubahan sosial merefleksikan proses transformasi, ada perubahan sosial yang meliputi institusi tertentu termasuk juga hubungan diantara institusi tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya dalam pembangunan Kota Surabaya dilaksanakan oleh beberapa dinas-dinas yang diwilayah Kota Surabaya. Dalam Pasal 2 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Kota Surabaya, Dinas yang ada di Pemerintah Kota Surabaya ada 18 Dinas, diantaranya adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Berdasarkan peraturan Wali Kota Surabaya No 91 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (1) merumuskan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan, (2) menyelenggarakan urusan kebersihan dan pertamanan, (3) pembinaan dan melaksanakan tugas, (4) pengelolaan ketatausahaan, (5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran institusi penanggulangan sampah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan

mengenai pengelolaan kebersihan. Apalagi dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka dalam pelaksanaan prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dititik beratkan pada Pemerintah Kota / Kabupaten sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan sistem desentralisasi. Sebagai konsekuensinya, maka urusan - urusan Pemerintahan akan lebih banyak diserahkan kepada Pemerintah Kota / Kabupaten.

Untuk mewujudkan suatu lingkungan yang bersih, maka tidak akan terlepas kaitannya dengan masalah sampah yang dari hari ke hari semakin menumpuk. Makin menumpuknya volume sampah tersebut karena adanya penambahan penduduk yang semakin meningkat dan disertai juga dengan adanya aktivitas manusia yang semakin berkembang dan pembangunan yang dilakukan juga terus meningkat, sehingga sisa atau bekas makanan dan sisa barang industri yang biasa kita kenal sebagai sampah akan semakin bertambah pula.

Surabaya sebagai kota terbesar ke dua setelah Jakarta, bahwa beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah / kota sangat berat. Salah satu dampak dari pembangunan kota Surabaya adalah terjadinya penambahan penduduk yang semakin pesat, yang diantaranya dapat diakibatkan oleh besarnya arus urbanisasi dan pertumbuhan alami (kelahiran) penduduk kota Surabaya itu sendiri, yang mengakibatkan semakin banyak juga sampah yang dihasilkan oleh masing-masing penduduk yang ada di kota Surabaya.

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia pasti akan menghasilkan buangan atau sampah. Semakin bertambahnya penduduk Surabaya otomatis menimbulkan banyak juga sampah

yang dihasilkan dari aktifitas-aktifitas penduduk Surabaya. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Pengolahan sampah di kota Surabaya saat ini belum dikelola secara maksimal, pengelolaan yang ada saat ini hanya terbatas pada pengolahan sampah secara konvensional yaitu hanya diangkut dari tempat penghasil sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kemudian hanya dibuang begitu saja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Jumlah sampah yang dihasilkan kota Surabaya saat ini adalah sekitar 9.675 m³/hari dan yang masuk ke TPA adalah sekitar 6.064 m³/hari, itu berarti pengolahan sampah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA belum dilakukan secara optimal.

(<http://anggrass.wordpress.com/2011/01/11/bertambahnya-sampah-akibat-pertambahan-penduduk-di-surabaya/>)

Masyarakat yang kurang memahami lingkungan banyak yang menyemarinya dengan sampah. Dan di kota-kota besar seperti Surabaya pada musim penghujan sering terkena banjir. Dikarenakan dari masyarakat yang membuang sampah yang sembarangan seperti, membuang sampah di selokan, sungai, dan tempat umum lainnya.

Faktor penyebab terjadinya banjir dan kesehatan masyarakat Kecamatan Tambaksari menurun dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran untuk menjaga lingkungan, kurangnya partisipasi masyarakat, sistem pengawasan yang dilakukan, kurangnya koordinasi, pemberdayaan kelembagaan dalam pengaturan tempat pembuangan sampah

<http://lugitaherwani.wordpress.com/2010/03/31/lingkungan>

Koordinasi dan pengawasan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Dengan koordinasi dan pengawasan yang baik maka

akan tercipta suatu perilaku masyarakat yang mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan terutama dalam hal kebersihan lingkungan.

Menurut Terry, (2001 : 124) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Diperlukan koordinasi yang lebih di Surabaya terutama di Kecamatan Tambaksari untuk menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Dengan lingkungan yang bersih kesehatan masyarakat akan lebih meningkat.

Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas masyarakat dalam kegiatan pembuangan sampah. Agar masyarakat tidak lagi membuang sampah secara sembarangan. Dan pengawasan yang lebih pada petugas kebersihan agar benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat menciptakan lingkungan yang bersih.

Menurut Siagian (2003 : 112) yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kebersihan khususnya masalah sampah. Dengan melakukan koordinasi dan pengawasan yang lebih optimal dalam pengelolaan kebersihan.

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan sampah yang dihasilkan oleh setiap Kecamatan di kota Surabaya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Volume sampah yang dihasilkan berdasarkan Kecamatan di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Volume sampah (m3/hari)
Surabaya Pusat			
1.	Tegalsari	31,605	404.54
2.	Genteng	18,751	240.01
3.	Bubutan	31,683	405.54
4.	Simokerto	26,500	339.20
Surabaya Utara			
5.	Pabean Cantikan	23,731	303.76
6.	Semampir	43,044	550.96
7.	Krembangan	30,990	396.67
8.	Kenjeran	29,037	371.67
9.	Bulak	8,954	114.61
Surabaya Timur			
10.	Tambaksari	61,006	780.88
11.	Gubeng	43,092	551.58
12.	Rungkut	24,891	317.68
13.	Tenggiling Mejoyo	14,429	184.69
14.	Gunung Anyar	12,311	157.58
15.	Sukolilo	26,390	337.79
16.	Mulyorejo	21,496	275.15
Surabaya Selatan			
17.	Sawahan	58,049	743.03
18.	Wonokromo	49,704	636.21
19.	Karangpilang	19,135	244.93
20.	Dukuh Pakis	15,532	198.81
21.	Wiyung	16,676	213.45
22.	Wonocolo	20,647	264.28
23.	Gayungan	11,929	152.69
24.	Jambangan	11,299	144.63
Surabaya Barat			
25.	Tandes	24,217	309.98
26.	Sukomanunggal	24,129	308.85
27.	Asemrowo	8,754	112.05
28.	Benowo	11,161	142.86
29.	Pakal	9,296	118.99
30.	Lakarsanti	13,365	171.07
31.	Sambikerep	14,183	181.54
TOTAL		755,914	9,675.70

*Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2009
Diolah oleh Badan Lingkungan Hidup, 2009*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa volume sampah terbanyak di Surabaya, baik Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan dan Surabaya Barat, volume sampah terbanyak yaitu di Surabaya Timur tepatnya di Kecamatan Tambaksari yaitu 780.88 m³/hari dengan jumlah rumah tangga 61,006 orang.

Beberapa upaya dan program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan kebersihan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Masalah sampah memang memerlukan perhatian yang lebih dari Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai instansi Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kebersihan.

Dengan latar belakang seperti yang telah dijelaskan diatas dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul “ PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN di PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi kasus di Kecamatan Tambaksari Surabaya) “

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu “ Bagaimanakah Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Kebersihan di Pemerintah Kota Surabaya (studi kasus di Kecamatan Tambaksari Surabaya) ”.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Kebersihan di Pemerintah Kota Surabaya (studi kasus di Kecamatan Tambaksari Surabaya).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Sebagai wawasan dan pengalaman serta menambah pengetahuan tentang Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Kebersihan di Pemerintah Kota Surabaya.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dan informasi yang berarti bagi instansi yang berkaitan mengenai meningkatkan kebersihan, khususnya bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan di Pemerintah Kota Surabaya.

3. Bagi Fakultas

Sebagai referensi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pokok kajian serupa dimasa mendatang, serta untuk memberikan tambahan literatur bagi perpustakaan.